

PENGARUH TRANSPARANSI, BUDAYA ORGANISASI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Oktavia Berliana Putri
Oktaviabp1999@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of transparency, organization culture, and accountability on the performance of local government. The population of this research used employees who worked at the Counseling hall of Family Planning Kedungpring district, Sugio, Modo, and Bluluk. This research was a quantitative method. Furthermore, the sample of this research used purposive sampling method i.e. a sample collection technique based on the consideration or certain criteria. This research used a survey method. The data sources of this research used primary data, meanwhile data collection used questionnaire technique. and then, the analysis data used multiple linear analysis. On the other hand, the research result showed that transparency, organizational culture, and accountability had a positive effect on government performance. This result is reinforced by the acquisition of the coefficient of determination (R^2) of 52.6% which indicates that the government's performance at the SKPD of Lamongan Regency is influenced by the variables of transparency, organizational culture and accountability. While the remaining 47.4% is influenced by other variables that are not included in the regression model.

Keywords: transparency, organization culture, accountability, government performance

ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kedungpring, Sugio, Modo dan Bluluk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode survey. Sumber data yang digunakan merupakan data primer, pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hasil ini diperkuat dengan perolehan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 52,6% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh variabel transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas. Sedangkan sisanya 47,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi tersebut.

Kata Kunci: transparansi, budaya organisasi, akuntabilitas, kinerja pemerintah

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara terdapat pemerintahan yang berfungsi sebagai suatu kesatuan organisasi dimana pemerintah daerah atau pemerintah pusat mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah serta memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang secara efektif, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sedang mengalami kemajuan sangat pesat.

Dengan adanya kebijakan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggungjawab besar dalam mengelola keuangan serta mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Wewenang dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan kemandirian dan kedewasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing tanpa campur tangan dari pemerintah pusat lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrias (2009) permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pemerintah daerah yakni terjadinya ketidakefektifan, inefisiensi dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Penyebab dari permasalahan ini yaitu kurangnya sistem mekanisme dasar pertanggungjawaban yang tidak dimiliki pemerintah daerah yang belum maksimal layaknya organisasi bisnis. Faktor utama yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Dampak dari kurang optimalnya proses perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan kinerja pemerintah di beberapa daerah menjadi buruk. Dalam menghindari permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan meningkatkan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan demi terwujudnya *good governance*.

Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keterbukaan suatu informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil dari kinerja dalam suatu organisasi. Dengan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengetahui seluruh rencana kerja kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (Damayanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2013) menyatakan bahwa Budaya Organisasi merupakan seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang kemudian digunakan untuk mengatasi masalah internal maupun eksternal organisasi. Budaya organisasi dikatakan kuat adalah budaya yang hampir semua manajer menganut bersama seperangkat nilai dan metode menjalankan bisnis yang relatif konsisten.

Elkha (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2018) akuntabilitas juga meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga masyarakat dan pemakai lainnya mengetahui aliran dana yang telah digunakan oleh pemerintah dan memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, tetapi akuntabilitas lebih menekankan bahwa laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Sampai pada saat ini, akuntabilitas kurang tersedianya suatu sistem pengukuran untuk menginformasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu instansi pemerintah kepada pihak yang berkepentingan karena akuntabilitas pada instansi pemerintah kurang objektif. Sehingga, perlu pengembangan suatu model sistem untuk mengukur kinerja dengan membantu pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja pada suatu organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten lamongan, (2) Apakah Budaya Organisasi berpengaruh

terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten lamongan, (3) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten lamongan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Lamongan, (2) Untuk menguji pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Lamongan. (3) Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Lamongan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi

Menurut Lestari (2018) teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yakni prinsipal dan agen. Teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan telah dipraktekkan pada organisasi *sector public* khususnya pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan praktek pelaporan kinerja yang didasari oleh teori keagenan.

Transparansi

Menurut Annisaningrum (2010) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Budaya Organisasi

Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Dengan adanya organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat sehingga dapat menarik, memelihara dan mengimbali orang yang berhasil melaksanakan peranannya dalam mencapai tujuan.

Akuntabilitas

Menurut Annisaningrum (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dengan adanya akuntabilitas maka pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun eksternal.

Kinerja Pemerintah

Menurut Purnama (2016) kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan utama dan

tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan dan lain-lain.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan dari transparansi yaitu menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan, metode apa yang akan dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dalam transparansi penyelenggara pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, dengan itu dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi terkait proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah sudah dilakukan oleh Jatmiko (2020), Krisherdian (2015) dan Saputra (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Budaya organisasi dalam sisi internal pegawai akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang diusulkan oleh pemerintahan agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses dan dampaknya akan memberikan keuntungan kepada pegawai itu sendiri dengan memiliki kepercayaan pada diri sendiri, kemandirian dan mengagumi diri sendiri. Dari sifat ini dapat meningkatkan harapan pegawai agar kinerjanya semakin meningkat. Penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah sudah dilakukan oleh Atarwaman (2015), Kurniawan (2013) dan Prayoga (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan salah satu persyaratan mendasar untuk pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran. Pelaku dari kebijakan publik terkait hal ini yaitu instansi pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepek terjangnya kepada publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah sudah dilakukan oleh Damayanti (2018), Hambur (2020) dan Meme (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana data yang akan digunakan dalam penelitian ini menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Penggunaan data primer dalam penelitian ini secara langsung dari survey melalui penyebaran kuisioner oleh peneliti. Populasi penelitian ini adalah pegawai SKPD di Kabupaten Lamongan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala balai atau unit pada masing-masing di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pegawai yang sudah bekerja selama \pm 3 tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu metode survey dengan menggunakan teknik kuisisioner. Kuisisioner adalah penelitian yang berupa gambaran umum tentang karakteristik populasi yang digambarkan oleh sampel dan menggunakan kuisisioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang objektif dan valid, dalam pengambilan sampel diharapkan mampu mewakili keberadaan populasi sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan dapat diambil suatu kesimpulan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah. Pertanyaan kuesioner untuk masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert 5 point, yaitu 1=Sangat Tidak Setuju, 2=Tidak Setuju, 3=Netral, 4=Setuju, 5=Sangat Setuju.

Pada variabel transparansi terdiri atas 6 item pertanyaan. Transparansi dapat diukur dengan perhitungan berdasarkan indikator-indikator menurut Damayanti (2018) yakni penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab, kemudahan dalam mengakses informasi, penyusunan mekanisme pengaduan jika ada permintaan untuk membayar uang suap atau ada peraturan yang dilanggar.

Pada variabel budaya organisasi terdiri atas 7 item pertanyaan. Budaya organisasi dapat diukur dengan perhitungan berdasarkan indikator menurut Pranitasari (2011) yaitu profesionalisme, jarak dan manajemen, percaya pada rekan sekerja, keteraturan, permusuhan dan integrasi.

Pada variabel akuntabilitas terdiri atas 9 item pertanyaan. Akuntabilitas dapat diukur dengan perhitungan berdasarkan indikator menurut Damayanti (2018) yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

Pada variabel kinerja pemerintah terdiri atas 9 item pertanyaan. Kinerja pemerintah dapat diukur dengan perhitungan berdasarkan indikator menurut Damayanti (2018) yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staff, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesalihan atau kevalidan pertanyaan atau instrument yang ada di kuesioner. Dasar pengambilan keputusan analisis uji statistik validitas (signifikan) yaitu jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka pernyataan atau instrument dalam kuisisioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid) sedangkan jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka pernyataan atau instrumen dalam kuisisioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid).

Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana jawaban kuisioner tersebut memiliki konsistensi ataupun kesamaan yang digunakan pada waktu yang berbeda. Data dinyatakan reliabel jika dua data atau lebih peneliti dalam obyek yang sama atau sekelompok data jika di pecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Menurut Ghazali (2011) mengemukakan bahwa variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* > 0,60 butir pertanyaan dalam instrument penelitian merupakan dapat diandalkan, sedangkan jika nilai *Cronbach's alpha* < 0,60 maka butir pertanyaan tidak bisa diandalkan.

Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi atau gambaran umum mengenai variabel yang diteliti. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran dari keseluruhan dari sampel dan untuk mempermudah memahami variabel dependen dan independent yang digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki tujuan agar model regresi berganda dalam penelitian signifikan dan representative, maka model regresi berganda harus memenuhi asumsi dasar klasik. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis apakah dinyatakan valid atau tidak. Ghazali (2011) mengemukakan bahwa uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah penaksiran tidak bias dan terbaik atau bisa disingkat BLUE (*Best Linier Unbias Estimate*). Jenis asumsi klasik regresi linier berganda meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas menurut Elkha (2018) yaitu untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui normal probability plot dengan cara membandingkan distribusi normal dan distribusi kumulatif. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas menurut Ghazali (2016) yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas atau independen dalam model regresi. Peneliti ini menggunakan dua cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas yaitu *Teknik Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dengan ketentuan jika $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas sedangkan jika $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolinearitas sedangkan jika nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas sedangkan jika nilai *tolerance* < 0,1 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas menurut Ghazali (2016) yaitu untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Peneliti ini menggunakan cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan plot dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah

terjadinya heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Tujuan dari analisis regresi berganda menurut Elkha (2018) yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing dari variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independent mengalami 0 kenaikan atau penurunan. Metode statistik regresi berganda menggunakan model berikut:

$$KPD = \alpha + \beta_1 TR + \beta_2 BO + \beta_3 AK + e$$

Keterangan:

KPD : Kinerja Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 TR : Transparansi
 BO : Budaya Organisasi
 AK : Akuntabilitas
 e : Error

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tujuan uji F menurut Damayanti (2018) yaitu untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan analisis uji F yaitu jika nilai signifikan $> 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan koefisien determinasi (R^2) menurut Ghozali (2016) yaitu untuk mencari seberapa besar variasi variabel independent dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$), jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas sedangkan jika nilai R^2 mendekati satu maka variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tujuan uji t menurut Ghozali (2011) yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hipotesis yang digunakan adalah apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak sedangkan apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 ditolak H_a diterima. H_0 : Variabel-variabel independent tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. H_a : Variabel-variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Peneliti mempunyai beberapa alasan memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai objek penelitian dikarenakan sebagai organisasi sektor, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik, kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk lebih tanggap akan lingkungannya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan pada 4 SKPD di Kabupaten Lamongan yaitu terdiri dari Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kedungpring, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Sugio, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Modo dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Bluluk. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 minggu mulai dari hari senin s/d jumat tanggal 12 Juli 2021 s/d 16 Juli 2021. Jumlah kuesioner yang dikirim untuk setiap Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sebanyak 25 kuisisioner, sehingga total kuesioner yang dikirim sebanyak 100 kuisisioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuisisioner sehingga tidak ada kuesioner yang tidak kembali. Dengan demikian diperoleh jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner dengan distribusi sampel yang disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan Kuesioner

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Frekuensi
1	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kedungpring	25
2	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Sugio	25
3	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Modo	25
4	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Bluluk	25
Total		100

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Data Responden (Data Demografi)

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer sebagai bahan yang akan diolah dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 responden. Data responden tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan, lama bekerja dan pendidikan terakhir.

Data Responden Menurut Usia

Tabel 2
Data Responden Menurut Usia

Usia	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-30 Tahun	38	38.0	38.0	38.0
31-40 Tahun	45	45.0	45.0	83.0
41-50 Tahun	11	11.0	11.0	94.0
> 51 Tahun	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Data Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3
Data Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Pria	43	43.0	43.0	43.0
Wanita	57	57.0	57.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Data Responden Menurut Jabatan Saat Ini

Tabel 4
Data Responden Menurut Jabatan Saat Ini

Jabatan Saat Ini	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kepala Balai	4	4.0	4.0	4.0
Setingkat Kepala Sub	4	4.0	4.0	8.0
Bagian Setingkat Kepala	4	4.0	4.0	12.0
Bidang Staff	88	88.0	88.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Data Responden Menurut Lama Bekerja

Tabel 5
Data Responden Menurut Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 5 Th	3	3.0	3.0	3.0
5-10 Th	37	37.0	37.0	40.0
10-15 Th	33	33.0	33.0	73.0
>15 Th	27	27.0	27.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Data Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 6
Data Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S1	74	74.0	74.0	74.0
S2	12	12.0	12.0	86.0
Lain-lain	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 7
Uji Validitas

Variabel	r Hitung	r Tabel	Signifikansi	Kesimpulan
TR1	0,595	0,1966	0.000	Valid
TR2	0,691	0,1966	0.000	Valid
TR3	0,715	0,1966	0.000	Valid
TR4	0,628	0,1966	0.000	Valid
TR5	0,706	0,1966	0.000	Valid
TR6	0,420	0,1966	0.000	Valid
BO1	0,682	0,1966	0.000	Valid
BO2	0,642	0,1966	0.000	Valid
BO3	0,666	0,1966	0.000	Valid

BO4	0,628	0,1966	0.000	Valid
BO5	0,677	0,1966	0.000	Valid
BO6	0,756	0,1966	0.000	Valid
BO7	0,767	0,1966	0.000	Valid
AK1	0,644	0,1966	0.000	Valid
AK2	0,606	0,1966	0.000	Valid
AK3	0,439	0,1966	0.000	Valid
AK4	0,543	0,1966	0.000	Valid
AK5	0,545	0,1966	0.000	Valid
AK6	0,582	0,1966	0.000	Valid
AK7	0,646	0,1966	0.000	Valid
AK8	0,336	0,1966	0.000	Valid
AK9	0,682	0,1966	0.000	Valid
KP1	0,560	0,1966	0.000	Valid
KP2	0,446	0,1966	0.000	Valid
KP3	0,572	0,1966	0.000	Valid
KP4	0,592	0,1966	0.000	Valid
KP5	0,490	0,1966	0.000	Valid
KP6	0,432	0,1966	0.000	Valid
KP7	0,574	0,1966	0.000	Valid
KP8	0,303	0,1966	0.000	Valid
KP9	0,496	0,1966	0.000	Valid

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil dari Tabel 7 diatas menunjukkan hasil uji validitas semua indikator dari semua variabel dependen maupun independen dapat menunjukkan hasil yang valid, karena nilai r hitung $>$ r tabel dan tingkat signifikannya $<$ 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	<i>Alpha</i>	Kesimpulan
Transparansi	0,697	0,60	Reliabel
Budaya Organisasi	0,815	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,721	0,60	Reliabel
Kinerja Pemerintah	0,619	0,60	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil Tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa semua masing-masing indikator memiliki *alpha cronbach* $>$ 0,60. Hal ini dapat dikatakan semua variabel dependen dan independen bersifat reliabel atau konsisten.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil Tabel 9 dibawah terkait dengan pernyataan responden tentang kinerja pemerintah, dapat dilihat bahwa rata-rata skor responden yang diperoleh memberikan jawaban setuju.

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang Kinerja Pemerintah

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1.	Saya berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan.	0	0	45	48	7	100
2.	Saya berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan laporan.	0	5	41	48	6	100
3.	Saya ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan.	0	8	41	42	9	100
4.	Saya berperan dalam mengevaluasi rencana kinerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit saya.	0	5	47	40	8	100
5.	Saya berperan dalam mengarahkan para bawahan yang ada pada unit saya.	0	3	43	50	4	100
6.	Saya berperan dalam mengelola, mengatur, dan memilih pegawai pada unit saya.	0	0	56	39	5	100
7.	Saya berperan dalam melakukan kontak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada unit/sub unit saya dengan pihak luar.	0	0	40	50	10	100
8.	Saya berperan dalam mewakili organisasi saya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi.	0	0	35	52	13	100
9.	Saya berperan dalam mengevaluasi kinerja, dan kejelasan sasaran kinerja secara menyeluruh.	1	4	40	53	2	100

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil Tabel 10 dibawah terkait dengan pernyataan responden tentang transparansi, dapat dilihat bahwa rata-rata skor responden yang diperoleh memberikan jawaban setuju.

Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Transparansi

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1.	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada	1	6	26	59	8	100

	masyarakat dapat meningkatkan transparansi.						
2.	Selama ini masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran.	2	5	37	47	9	100
3.	Saya jarang mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran.	0	7	26	54	13	100
4.	Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu.	0	4	35	50	11	100
5.	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat meningkatkan suara rakyat	0	3	37	46	14	100
6.	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.	0	0	31	56	13	100

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil Tabel 11 dibawah terkait dengan pernyataan responden tentang budaya organisasi, dapat dilihat bahwa rata-rata skor responden yang diperoleh memberikan jawaban setuju.

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Budaya Organisasi

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1.	Dalam organisasi ini orang mencurahkan seluruh kemampuannya untuk bekerja.	0	0	21	42	37	100
2.	Dalam organisasi setiap orang mengetahui apa tujuan dan pentingnya pekerjaan.	0	0	16	51	33	100
3.	Manajer mempertahankan orang-orang yang baik untuk departemen (divisi)nya sendiri.	0	0	17	62	21	100
4.	Para anggota bersikap terbuka kepada orang lain.	0	0	16	59	25	100
5.	Manajer puncak mengambil keputusan berdasarkan fakta.	0	0	21	60	19	100
6.	Karyawan baru membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk merasa kerasan.	0	0	23	56	21	100
7.	Kerjasama antar departemen terjalin dengan baik.	0	2	28	47	23	100

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil Tabel 12 dibawah terkait dengan pernyataan responden tentang akuntabilitas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor responden yang diperoleh memberikan jawaban setuju.

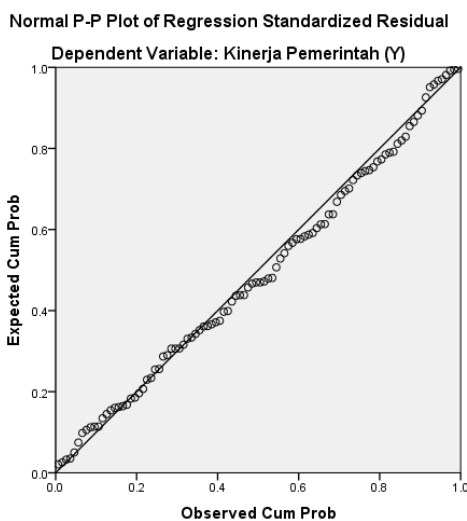
Tabel 12
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	

1.	Proses penyusunan anggaran melibatkan elemen masyarakat.	0	0	41	50	9	100
2.	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat.	0	0	40	52	8	100
3.	Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran.	0	1	42	51	6	100
4.	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.	0	3	33	58	6	100
5.	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran.	1	4	40	53	2	100
6.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus.	0	8	34	51	7	100
7.	Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu (sebelumnya).	0	3	36	52	9	100
8.	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya.	0	3	42	47	8	100
9.	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat luas.	0	0	38	53	9	100

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 1
Grafik Pengujian Data Normalitas
Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal antara 0 dengan pertemuan sumbu Y dan sumbu X. sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

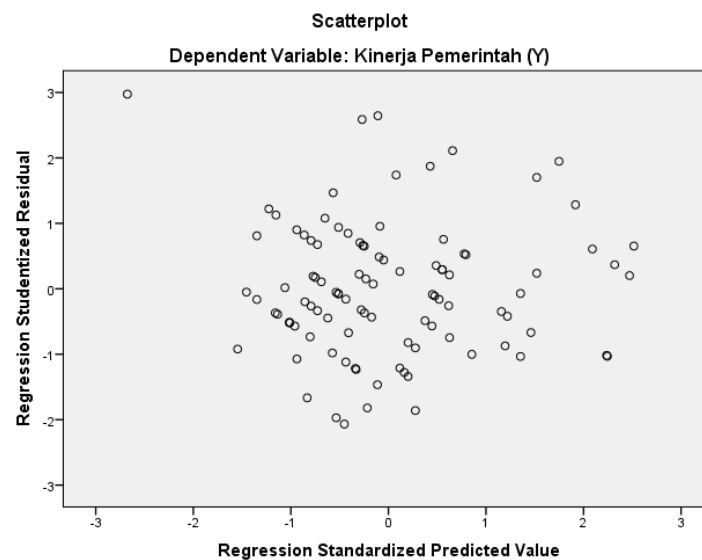
Tabel 13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Transparansi	0,679	1,474	Tidak terjadi multikolinearitas
Budaya Organisasi	0,923	1,083	Tidak terjadi multikolinearitas
Akuntabilitas	0,699	1,431	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 13 diatas, dapat dilihat bahwa transparansi memiliki nilai tolerance 0,679 dan VIF 1,474, budaya organisasi memiliki nilai *tolerance* 0,923 dan VIF 1,083 dan akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* 0,699 dan VIF 1,431. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut variabel bebas telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas dan dapat digunakan karena bebas dari multikolinearitas karena nilai *tolerance* tidak lebih dari 1 dan VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2
Grafik Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2 diatas, dapat disimpulkan tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan telah memenuhi uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Linier Berganda

Tabel 14
Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.773	.283		2.727	.008
Transparansi (X1)	.149	.060	.211	2.474	.015
Budaya Organisasi (X2)	.144	.052	.204	2.791	.006
Akuntabilitas (X3)	.460	.076	.507	6.025	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil dari Tabel 14 diatas maka kinerja pemerintah dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KP = 0,773 + 0,149 TR + 0,144 BO + 0,460 AK + e$$

Uji Kelayakan Model

Tabel 15
Hasil Uji f
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.716	3	1.905	35.473	.000 ^b
Residual	5.157	96	.054		
Total	10.873	99			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X3), Budaya Organisasi (X2), Transparansi (X1)

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil dari Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa F sebesar 35,473 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Koefiesn Determinasi (Uji R²)

Tabel 16
Koefisien Determinasi (Uji R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.526	.511	.23177

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas(X3), Budaya Organisasi(X2), Transparansi (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil Tabel 16 diatas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,725 atau 72,5%. Nilai R Square (R²) dalam penelitian ini diperoleh sebesar 0,526 atau 52,6% yang menunjukkan

bahwa kinerja pemerintah pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (Kecamatan Kedungpring, Sugio, Modo dan Bluluk) dipengaruhi oleh variabel transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 17
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.773	.283		2.727	.008
T	.149	.060	.211	2.474	.015
BO	.144	.052	.204	2.791	.006
A	.460	.076	.507	6.025	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah (Y)

Sumber: Kuesioner, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil dari Tabel 17 diatas dapat disimpulkan dari masing-masing hipotesis sebagai berikut:

Uji Hipotesis Pertama

H₁: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t sebesar 2,474 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 yang artinya tingkat signifikansi < 0,05. Kesimpulan dari uji t ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Uji Hipotesis Kedua

H₂: Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t sebesar 2,791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang artinya tingkat signifikansi < 0,05. Kesimpulan dari uji t ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya variabel budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Uji Hipotesis Ketiga

H₃: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t sebesar 6,025 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya tingkat signifikansi < 0,05. Kesimpulan dari uji t ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dilihat pada tabel uji t menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Dengan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya bentuk pertanggungjawaban pemerintah SKPD Kabupaten Lamongan maka kinerja pemerintah SKPD akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020), Krisherdian (2015) dan Devi et al. (2014) yang menyatakan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga dalam penyelenggaraan

pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dilihat pada tabel uji t menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Dengan ini menunjukkan bahwa suatu organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat dan baik sehingga dapat menarik dan memelihara orang yang berhasil dalam peranannya untuk mencapai tujuan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atawarman (2015), Kurniawan (2013) dan Prayoga (2017) yang menyatakan hasil bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa suatu organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat dan baik sehingga dapat menarik dan memelihara orang yang berhasil dalam peranannya untuk mencapai tujuan.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dilihat pada tabel uji t menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Dengan ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun eksternal.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2018), Hambur (2020) dan Meme (2020) yang menyatakan hasil bahwa hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu proses peningkatan kinerja. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun eksternal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Dengan adanya pengaruh Transparansi terhadap kinerja pemerintah memiliki penjelasan bahwa dengan adanya transparansi yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik. (2) Variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Dengan adanya pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja pemerintah memiliki penjelasan bahwa suatu organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat dan baik sehingga dapat menarik dan memelihara orang yang berhasil dalam peranannya untuk mencapai tujuan. (3) Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Adanya pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah memiliki penjelasan bahwa hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu proses peningkatan kinerja. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun eksternal.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kinerja pemerintah pada peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berkualitas, dengan mempertimbangkan saran mengenai beberapa hal sebagai berikut: (1) Penelitian

selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dikarenakan pada dasarnya masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah seperti gaya kepemimpinan, partisipasi, komitmen organisasi dll. (2) Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian sehingga penyebaran kuesioner mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh transparansi, budaya organisasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh. (3) Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan metode lain untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, seperti metode wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, B. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Annisaningrum. 2010. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*. (Diakses 06 Juni 2021).
- Atarwaman, R. J. D. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon. *Jurnal SOSOQ 4(2): 20-28*.
- Damayanti, E. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 7(3): 1-19*.
- Elkha, F. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 9(3): 1-17*.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hambur, I.A. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 8(9): 1-18*.
- Jatmiko, B. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti 7(2): 231-242*.
- Krisherdian, R.A.G. 2015. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa: 1-6*.
- Kurniawan, M. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik. 1-27.
- Lestari, A. L. A. L. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budaya Organisasi dan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintah Aparat Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 9(9): 1-16*.
- Mangkunegara, A. P. 2005. *Perilaku dan Budaya Organisasi*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Meme, M. E. 2018. Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 8(10): 1-18*.
- Pranitasari, R. 2011. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Prayoga, M. A. 2017. Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOM Fekon 4(1): 90-103*.
- Purnama, F. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1(2): 1-14*.

- Saputra, D. S. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada PEMDA Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Akuntansi* 3(2): 76-84.
- Wati, E. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar). *Artikel Ilmiah*: 1-20.